

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian. Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa para buruh garmen di Kamboja telah mengalami eksploitasi dengan berbagai macam bentuk kekerasan fisik, mengalami masalah kesehatan, pemerasan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, gaji tidak dibayar sampai pada kekerasan terhadap serikat pekerja. Dalam kasus ini, Kamboja menjadi pihak yang wajib bertanggung jawab atas permasalahan HAM yang terjadi. Untuk melihat seberapa jauh tanggung jawab Kamboja dalam menegakan hak buruh garmen, dapat dilihat dari sejauh mana Kamboja menghormati ICESCR sebagai konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai bentuk penghormatan, Kamboja mengimplementasikan ratifikasi konvensi tersebut dengan adanya UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja tahun 2016. Penghormatan suatu negara juga dapat dilihat dari efektivitas undang-undang sebagai bentuk implementasi atas ratifikasi ICESCR. Jika meninjau isi pasal, UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan relatif kuat karena UU tersebut telah memuat seluruh aturan dan standar ketenagakerjaan namun UU ini tidak memuat sanksi untuk pemberi kerja. Tidak adanya kejelasan sanksi untuk pemberi kerja membuat UU ini dapat dikatakan bersifat tidak mengikat untuk semua. Dengan kekurangan UU Ketenagakerjaan ini, penghormatan Kamboja terhadap ICESCR relatif lemah apalagi dengan UU Serikat Pekerja tahun 2016 yang justru memunculkan keterbatasan untuk para buruh bermusyawarah. Penghormatan Kamboja terhadap ICESCR yang masih rendah kemudian menjadi perhatian internasional salah satunya ILO sebagai organisasi perburuhan internasional.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ILO memiliki tiga peran dalam menegakkan hak asasi buruh di Kamboja dalam periode tahun 2014-2022 yakni arena dan aktor independen. Sebagai arena, ILO mengadakan kerja sama

dengan pemerintah, sektor swasta yakni merek internasional, dan badan internasional serta mengadakan konferensi sebagai tempat berdiskusi. Fokus peran ILO sebagai arena terbagi menjadi dua bagian yakni peran ILO sebagai arena pertama berfokus pada permasalahan mengenai peningkatan upah minimum dan peningkatan keefektifan inspeksi pabrik sementara fokus kedua yakni pada permasalahan peningkatan kondisi kerja dan serikat pekerja. Sebagai aktor, ILO menjalankan lembaga buaatannya bernama BFC yang telah didirikan pada tahun 2001 dan melakukan riset dan studi lapangan yang ditujukan untuk berbagi pengetahuan, promosi prinsip fundamental dan advokasi.

Pada studi kasus ini, ILO tetap berperan sebagai instrumen, walaupun tujuan ILO berbeda dengan kepentingan Kamboja sehingga tidak ada kebijakan yang dikeluarkan Kamboja dalam menegakkan hak asasi buruh. Walaupun begitu peran ILO sebagai instrumen dapat dilihat melalui motif ILO bergabung dan meratifikasi konvensi ILO adalah untuk memperbaiki citra ILO sebagai negara yang memiliki rekam jejak demokrasi dan hak asasi manusia yang baik sehingga dapat menarik investasi asing di industri garmen dan tetap menahan investor asing yang telah menanamkan modal.

4.2. Saran

4.2.1. Bagi ILO

ILO memiliki peran sebagai aktor independen dengan BFC yang bertindak sebagai lembaga pihak ketiga tetapi BFC harus membenahi sistem pengawasan dan transparansi agar kondisi kerja di pabrik dapat mengalami peningkatan. Upaya yang dapat dilakukan dalam membenahi sistem pengawasan dapat dilakukan melalui perluasan informasi dan daftar pabrik bermasalah yang telah dipantau melalui *Database Critical Issues* kepada serikat pekerja dan pekerja dengan akses yang mudah. Untuk melindungi pelapor dan mendapatkan data secara lebih luas, ILO dapat dengan berkoordinasi dengan pekerja, perwakilan serikat pekerja independen, dan aktivis hak-hak pekerja untuk memperkuat mekanisme wawancara di luar lokasi dengan pekerja selama pemantauan pabrik dengan BFC.

4.2.2. Bagi Pemerintah Kamboja

Pemerintah Kamboja menjadi pihak yang wajib bertanggung jawab dalam menegakkan hak asasi buruh sektor industri garmen di Kamboja. Pemerintah Kamboja perlu membereskan ulang sistem industri garmen dimulai dari undang-undang perlindungan pekerja, transparansi, kerja sama, dan bersikap tegas membasmi oknum pelanggaran dan mekanisme penetapan upah. Pemerintah Kamboja perlu mengamandemen sejumlah undang-undang yakni UU Ketenagakerjaan sesuai dengan standar internasional dan UU Serikat Pekerja Tahun 2016. Penyusunan undang-undang tersebut dapat dilakukan bersama organisasi hak asasi manusia lokal dan internasional. Pemerintah Kamboja juga dapat bekerja sama bahkan memanfaatkan ILO melalui BFC untuk membantu pemerintah bersikap transparan. Pemerintah dapat menerbitkan laporan kemajuan publik tentang tindakan penegakan yang diprakarsai oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Pelatihan Kejuruan sehingga masyarakat umum dapat mengetahui pabrik dengan tingkat kepatuhan rendah yang disebutkan dalam *Database Transparency* BFC. Dalam keterkaitannya dengan BFC, pemerintah juga perlu untuk memperluas mandat BFC memasukkan pabrik tanpa izin ekspor untuk dipantau.

Pelanggaran hak buruh yang terjadi dari awal sampai akhir proses hubungan kerja menjadikan Kementerian Ketenagakerjaan harus meningkatkan regulasi dan memantau pabrik lebih ketat terutama dalam praktik perekrutan penggunaan kontrak FDC. Pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan Kamboja juga dapat membuktikan kesungguhannya dalam menegakkan hak asasi buruh garmen dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 158 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Prakarsa Pengusaha; Nomor 183 tentang Perlindungan Maternitas (2000); dan No. 131 tentang Penetapan Upah Minimum (1983) mengingat ketiga topik tersebut menjadi permasalahan serius bagi buruh garmen selama tahun 2014-2022. Upaya terpenting yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengakhiri sikap sewenang-wenang atas para pekerja garmen baik dari segi penetapan regulasi ataupun ketika pelaksanaan di lapangan.

4.2.3. Bagi Merek Internasional

Merek internasional harus bersikap transparan kepada publik mengenai seluruh unit produksi resmi secara regular, menunjukkan tingkat produksi, dan memberi informasi secara berkala mengenai waktu terakhir kali unit diperiksa oleh pengawas tenaga kerja. Pelanggaran yang banyak terjadi di pabrik subkontraktor membuat merek internasional perlu memberi perhatian lebih pada pabrik subkontraktor. Seluruh pabrik subkontrak yang berstatus resmi dan tidak resmi, memiliki izin atau tidak, berlisensi ekspor atau tidak harus dilaporkan kepada BFC dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan layanan pemantauan, konsultasi dan penegakkan hukum. Merek internasional diharapkan dapat memanfaatkan BFC dengan melakukan advokasi bersama BFC secara terbuka mencantumkan nama merek yang bersumber dari pabrik yang dipantau BFC agar memfasilitasi transparansi yang lebih besar. Apabila memungkinkan, merek harus berkontribusi terhadap pemantauan dan perbaikan kondisi pabrik sebelum menghentikan produksi dan mengakhiri hubungan bisnis.

4.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini berjalan cukup baik dengan walaupun masih memiliki kekurangan. Penelitian ini memiliki kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan referensi yang ada. Oleh karena itu, saya sebagai penulis akan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Jika memungkinkan dari segi dana dan waktu, peneliti selanjutnya dapat menggali data yang lebih dalam lagi dengan melakukan penelitian langsung ke Kamboja dan kantor ILO untuk mengumpulkan referensi yang lebih lengkap agar memuat hasil yang lebih detail. Peneliti selanjutnya dapat mewawancarai sumber-sumber yang menjadi subjek penelitian ini yakni para buruh dan perwakilan ILO untuk mendapatkan referensi yang beragam. Apabila tidak memungkinkan, peneliti selanjutnya harus benar-benar mempersiapkan diri dan mengumpulkan data lebih awal dalam proses pengumpulan data.